

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN INDONESIA
CABANG MAKASSAR**

Diajukan Oleh

Dewi Safitri Hakim

4515012070



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia Cabang
Makassar
Nama Mahasiswa : Dewi Safitri Hakim
Stambuk/NIM : 4515012070
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Tempat Penelitian : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Indonesia Cabang Makassar

Telah Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hasanuddin Remaja, SE., M.Si


Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Manajemen**


Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., M.H


Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si

Tanggal Pengesahan

PERNYATAAN KOERSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini :

Nama : Dewi Safitri Hakim

Nim : 45 15 012 070

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisa Kinerja Keuangan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia Cabang Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya sendiri dalam naskah skripsi ini tidak pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di sebut dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 29 Agustus 2019



Dewi Safitri Hakim

**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AT SOSIAL SECURITY
ORGANIZER (BPJS) INDONESIAN EMPLOYMENT**

By:

DEWI SAFITRI HAKIM

Prodi Management Faculty Of Economics

University Of Bosowa

ABSTRACT

DEWI SAFITRI HAKIM, 2019, undergraduate thesis. Analysis Of Financial Performance At Sosial Security Organizer (BPJS) Indonesia Employment is guided by Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si dan Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si.

This study aims to determine how the implementation of the services of the managing social security agency, and child entities after the transformation of PT. JAMSOSTEK berones a labor BPJS (Sosial Security Organizing Agency) by taking relevant 2015 to 2017 data aand conducting interviews with related parties in this case the organizer of BPJS. Analysis tools used in the form of ministerial decree No. KEP-100/MBU/2002. Research data obtained from financial.

Based on the results of the analysis obtained which shows very good performance. This is explained through the calculation results of ministerial decree of BUMN No. KEP-100/MBU/2002.

The conclusions further improve the company's performance through increased profits by increasing revenue and emphasizing the company's costs in curred.

Keyword: *Analysis Financial performance, financial statement, financial statement, BPJS.*

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN INDONESIA**

Oleh :

DEWI SAFITRI HAKIM

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Dewi Safitri Hakim 2019. Skripsi. Analisis kinerja keuangan terhadap peningkatan laba pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia Dibimbing oleh Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si dan Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak pasca transformasi PT JAMSOSTEK menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dengan mengambil data tahun 2015-2017 yang relevan serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pihak penyelenggara BPJS, Alat analisis yang digunakan berupa Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh yaitu menunjukkan kinerja sangat baik, hal ini dijelaskan melalui hasil perhitungan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002.

Kesimpulan lebih meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan laba dengan cara meningkatkan pendapatan dan menekankan biaya perusahaan yang terjadi.

Kata Kunci : Kinerja keuangan, laporan keuangan, analisis BPJS

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin, puji syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “ **Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia Cabang Makassar**”.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Abd. Hakim Undjung dan Ibunda Ratna Renyaan, adik penulis yang bernama Zulfikram Hakim, Fida Suhanita Hakim, Defita Salsabila Hakim yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang dan selalu menjadi tiang pengingat penulis agar menjadi kakak berbakti yang bisa dibanggakan dimata keluarga. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan segala usaha, bimbingan, tuntunan, motivasi, semangat dan kasih sayang yang telah dicurahkan dari orang-orang yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

Dengan segenap kerendahan hati, melalui kesempatan ini penulis juga ingin berterima kasih kepada:

1. Pertama – pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar SE, MM Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
4. Ibu Indrayani Nur, S.Pd, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
5. Kepada Bapak Dr. Hasanuddin Rammang, SE., M.Si dan Bapak Dr. Haeruddin Saleh, SE.,M.Si sebagai dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Seri Suriani SE., M.Si yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan Pendidikan kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.

8. Bapak Muhammad Eko Patria Jaya ,yang dengan sabar memberikan informasi, data dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian lapangan.
9. Teman – teman Manajemen khususnya angkatan 2015 dan Lembaga tercinta saya, HIMANAJ, BEM, HMI, tempatku berbagi warna – warni kehidupan selama di Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
10. Sahabat – sahabat terbaik penulis di kampus (Manisa, Ekayanthi Pertiwi, Widya Handayani Bakri, Nurfadillah, Danti Indrastuti Syahda, dan St. Utami Endang Hardiningsi yang selalu menemani dan memberikan dukungan untuk cepat – cepat selesai dan bisa sukses sama – sama.
11. Teman – teman dari kecil sampai saat ini yaitu Ian , sadli , Amel, Angga , Bintang, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu selalu memberikan semangat.
12. Terkhusus Ayu Tri Lestari, Yayat, fitri, alifa, yang membantu penulis dan memberikan saran yang baik selama penulisan skripsi ini selesai.
13. Teman – teman dari KKN KWU Angkatan 45 di Desa Bonto Tallasa Kab. Bantaeng kalian luar biasa
14. Dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sudah membantu.

Makassar, 29 Agustus 2019



Dewi Safitri Hakim

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerangka Teori	6
2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan	6
2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan	6
2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan	7
2.1.4 Pengertian Kinerja Keuangan	8
2.1.5 Tujuan Kinerja Keuangan	10
2.1.6 BUMN Infrastruktur	11
2.1.7 Tingkat Kesehatan BUMN Infrastruktur	15
2.1.8 Aspek Keuangan dan Kinerja Keuangan	17
2.1.9 Pengertian BPJS Ketenagakerjaan	28
2.1.10 Prinsip BPJS Ketenagakerjaan.....	31
2.1.11 Jenis-jenis BPJS Ketenagakerjaan	33

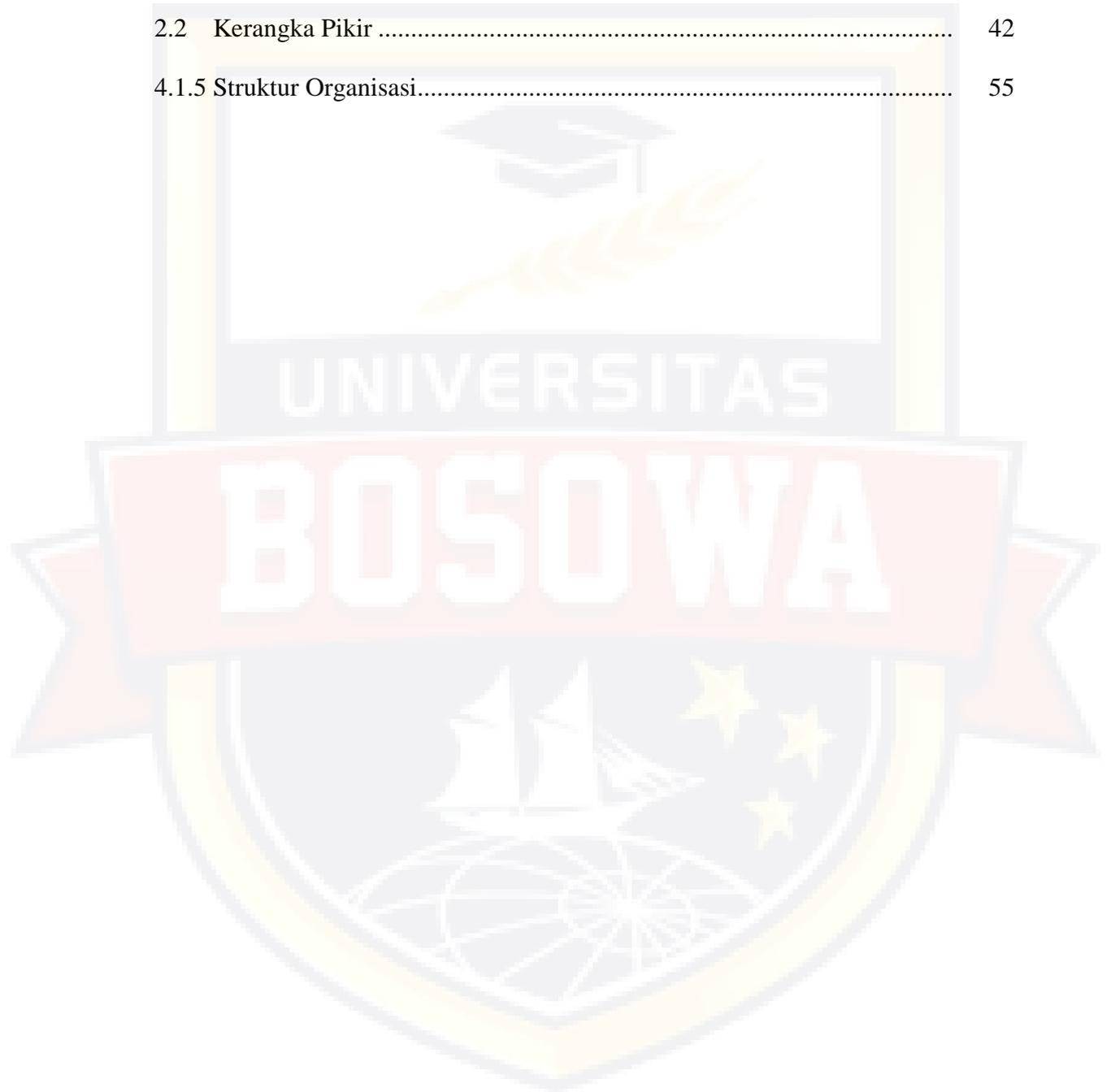
2.1.12 Sumber Aset Modal BPJS Ketenagakerjaan.....	36
2.1.13 Tujuan BPJS Ketenagakerjaan.....	38
2.1.14 Fungsi BPJS Ketenagakerjaan	40
2.2 Kerangka Pikir	42
2.3 Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian	44
3.2 Jenis dan Sumber Data	44
3.3.1 Jenis Data	44
3.3.2 Sumber Data	44
3.3 Metode Pengumpulan Data	44
3.4 Metode Analisis	45
3.5 Definisi Operasional	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan.....	49
4.1.1 Sejarah Singkat BPJS Ketenagakerjaan	49
4.1.2 Visi dan Misi	52
4.1.3 Fungsi BPJS Ketenagakerjaan.....	52
4.1.4 Arti Logo BPJS Ketenagakerjaan.....	53
4.1.5 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan	55
4.1.6 Uraian Tugas BPJS Ketenagakerjaan	56
4.2. Deskripsi Data	62
4.3. Analisis Data	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Indikator Serta Bobot Infrastruktur.....	18
Tabel 1.2 Daftar Skor Penilaian ROE.....	20
Tabel 1.3 Daftar Skor Penilaian ROI.....	22
Tabel 1.4 Daftar Skor Penilaian <i>Cash Ratio</i>	23
Tabel 1.5 Daftar Skor Penilaian <i>Collection Periods</i>	24
Tabel 1.6 Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan	25
Tabel 1.7 Daftar Skor Penilaian TATO	26
Tabel 1.8 Daftar Skor Penilaian TMS thd TA	27
Tabel 1.9 Daftar Skor Penilaian Modal Sendiri	28

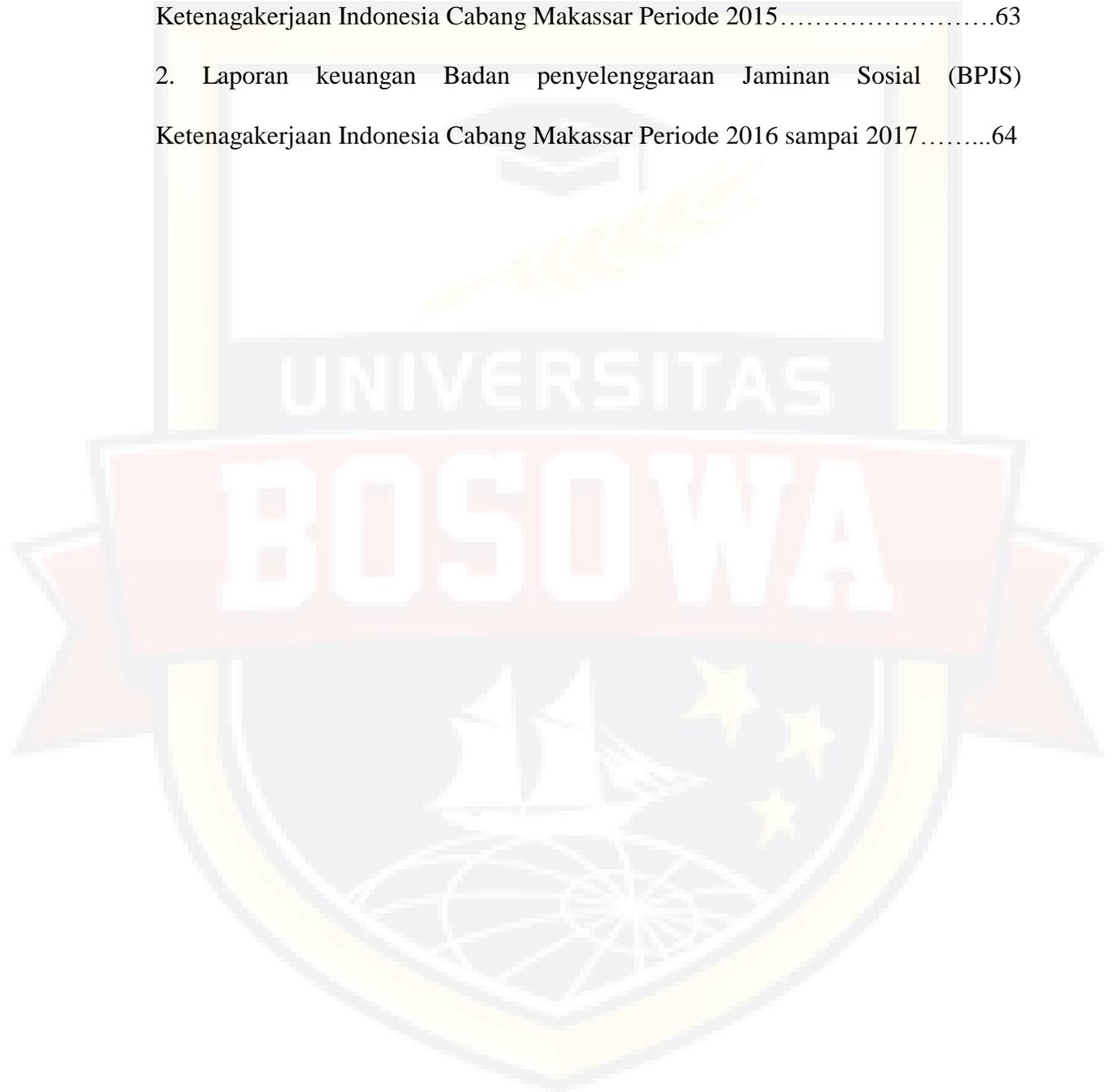
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.2 Kerangka Pikir	42
4.1.5 Struktur Organisasi.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan keuangan Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Indonesia Cabang Makassar Periode 2015.....63
2. Laporan keuangan Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Indonesia Cabang Makassar Periode 2016 sampai 2017.....64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era globalisasi khususnya di sektor ketenagakerjaan akan menghadapi tantangan yang cukup besar, persaingan antara dunia usaha akan semakin ketat dan penggunaan teknologi maju akan semakin mendapat perhatian sehingga pemilihan pekerja akan semakin selektif. Hanya pekerja yang memiliki kualitas diri yang baik, intelektual maupun derajat kesehatan yang tinggi yang pada akhirnya dapat meraih keberhasilan. Selain itu pemanfaatan pasar kerja internasional menuntut pula berbagai persyaratan serta kualifikasi dan hubungan antar manusi, serta keberhasilan pembinaan terhadap pekerja selama ini, akan meningkatkan kesadaran hukum mereka yang menyangkut hak dan kewajiban dalam hubungan industrial dan hal ini membuka peluang terjadinya perselisihan industrial baik yang menyangkut hak dan kepentingan termasuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja.

Situasi perekonomian di Indonesia sekarang ini membawa dampak persaingan yang semakin ketat diberbagai bidang industri. Untuk itu perusahaan harus dapat menghadapi persaingan yang ketat dalam bidang industrinya. Salah satu cara yang dapat diambil yaitu dengan meningkatkan kemampuan internalnya, baik berupa peningkatan teknologi, kualitas pelayanan, kualitas sumber daya manusia, efisiensi biaya, maupun kinerja yang semakin tinggi sehingga memerlukan teknologi yang baik dalam menunjang keberhasilan suatu perusahaan (Rian, 2013).

Perkembangan teknologi di dunia usaha menyebabkan banyak perusahaan memikirkan untuk selalu melakukan perbaikan disemua bidang yang dianggap kurang bermanfaat bagi perusahaan, termasuk dalam cara pengukuran kinerja manajemen perusahaan. Persaingan yang ada dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap perusahaan itu sendiri dan telah menjadi pengetahuan umum bahwa kegiatan dari setiap perusahaan bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan perusahaan itu sendiri. Analisis perkembangan kinerja keuangan dapat diperoleh melalui analisis terhadap data keuangan perusahaan yang tersusun dalam laporan keuangan (Maryam, 2012).

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Cara untuk mengetahui baik buruknya kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dapat diketahui dengan cara menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Adapun alat analisis kinerja keuangan pada perusahaan yang digunakan meliputi analisa rasio dalam aspek keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002.

Analisis terhadap laporan keuangan dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang akan diambil dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan penggunaan dana dan laporan sumber penggunaan kas. Analisa keuangan diperlukan oleh berbagai pihak, seperti para pemegang saham atau investor, kreditor, dan para manajer karena melalui hasil analisis keuanga ini mereka akan

lebih mengetahui posisi perusahaan yang bersangkutan dari pada perusahaan lainnya dalam satu kelompok industry (Moeljadi, 2006:43).

Sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia juga memerlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia agar manajemen dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia pada umumnya. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminann Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS),

diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan gambaran diatas peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian :

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah “ Bagaimana kinerja keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia Cabang Makassar selama periode tahun 2015 sampai dengan 2017 ? “

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis kinerja keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia Cabang Makassar selama periode tahun 2015 sampai dengan 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasidan referensi penelitian dibidang analisis kinerja keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia Cabang Makassar.
2. Bagi pengembang ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran dalam pengembangan ilmu ekonomi padabidang ketenagakerjaan, lebih khusus dalam analisis kinerja keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia Cabang Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Laporan keuangan meliputi bagian dari proses keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat di sajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas / laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Munawir yang dikutip oleh Fahmi (2014:22), mengatakan bahwa: “Laporan Keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (user) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial. Menurut Kasmir (2012:7).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan untuk perusahaan/BPJS merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut Kasmir, dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan” (2012:11), berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan juga aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Informasi keuangan lainnya

2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi utama dari manager keuangan adalah merencanakan, mencari dan memanfaatkan dana dengan berbagai cara untuk memaksimalkan daya guna (*efficiency*) dari perusahaan. Hal ini memerlukan pengetahuan akan pasar uang dari mana modal diperoleh dan bagaimana keputusan-keputusan yang tepat di bidang keuangan harus dibuat dan efisiensi dalam perusahaan dapat digalakkan.

Fungsi dari Manajemen Keuangan diantaranya sebagai berikut:

1. *Planning* atau bisa disebut juga dengan Perencanaan Keuangan, yang meliputi Perencanaan Arus Kas maupun Rugi Laba.

2. *Budgeting* atau penganggaran, yaitu perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien guna memaksimalkan dana yang telah dimiliki.
3. *Controlling* atau Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi dan perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan.
4. *Auditing* atau Pemeriksaan Keuangan, dilakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada dengan tujuan sesuai dengan kaidah standar akuntansi sehingga kecil terjadinya penyimpangan.
5. *Reporting* atau laporan Keuangan, dengan menyediakan laporan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan.

2.1.4 Pengertian Kinerja Keuangan

Untuk memutuskan dan menilai suatu perusahaan memiliki kualitas yang baik terdapat dua acuan yang paling dominan yang dapat dilakukan. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan dan kinerja nonkeuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. (Fahmi, 2014:2)

Kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode tertentu yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. (Sucipto, 2008). Kinerja keuangan suatu perusahaan biasanya tercermin dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada

waktu tertentu (biasanya) ditunjukkan dalam periode atau siklus akuntansi), yang menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu. Kinerja keuangan menurut:

UU No. 25 Tahun 1992 : Kinerja keuangan adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Sehingga penilaian terhadap kinerja keuangan menjadi sangat penting diberbagai macam usaha. Penilaian kinerja keuangan digunakan perusahaan supaya kegiatan operasionalnya lebih baik terutama pada bagian keuangan.

Kinerja keuangan merupakan hasil dari kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Dalam mewujudkan BPJS yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, diperlukan adanya kepastian terhadap standar dan tata cara yang dapat digunakan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian.

Penilaian terhadap kinerja keuangani dianggap penting untuk mengetahui apakah BPJS ketenagakerjaan tersebut mengalami peningkatan atau penurunan tiap tahunnya. Sesuai dengan keputusan menteri BPJS ketenagakerjaan dan usaha kecil dan menengah no. 35.3/ Per/ m.kukm/ x/ 2007 penilaian kinerja bisa diketahui dari berbagai aspek diantaranya aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jati diri BPJS.

Menurut Fahmi (2014:3) terdapat 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan
2. Melakukan perhitungan
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh
4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

2.1.5 Tujuan Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. Mengetahui tingkat likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.

2. Mengetahui tingkat solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Mengetahui tingkat rentabilitas

Rentabilittas atau yang sering disebut dengan profabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

4. Mengetahui tingkat stabilitas

Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen dan manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat.

2.1.6 BUMN Infrastruktur

Penjelasan-penjelasan dalam sub bab ini berupa: pengertian, maksud dan tujuan pendirian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara; pengertian, maksud dan tujuan pendirian Persero; pengertian dan kelompok BUMN Infrastruktur.

2.1.6.1 Pengertian, Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN

BUMN di Indonesia dapat berbentuk Persero dan Perum. Pemiliknya dikuasai seluruhnya atau sebahagian besar oleh negara. Maksud dan tujuan pendiriannya, antara lain adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003, bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya.

Menurut Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, bahwa badan usaha milik negara, yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat BUMN, adalah perusahaan perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 1998 dan perusahaan umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 1998.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

5. Turun aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

2.1.6.2 Pengertian, Maksud dan Tujuan Pendirian Persero

Persero merupakan sebutan singkat bagi BUMN yang terbentuk perseroan terbatas. Pemiliknya dikuasai paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh negara. Maksud dan tujuan pendirian Persero, antara lain adalah manajer keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Persero (Perero), bahwa perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang terbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang terbentuknya perseroan terbatasnya yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit

51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya utamanya mengejar keuntungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian Persero adalah:

1. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bedaya saing kuat
2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan

2.1.6.3 Pengertian dan Kelompok BUMN Infrastruktur

BUMN terdiri atas BUMN non jasa keuangan dan BUMN jasa keuangan. BUMN non jasa keuangan terdiri atas BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN infrakstruktur dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN non infrakstruktur. BUMN infrastruktur terdiri atas beberapa sektor, misalnya sektor perhubungan. Setiap sektor dapat terdiri atas beberapa bidang, misalnya bidang prasarana perhubungan udara. Setiap bidang dapat terdiri atas beberapa perusahaan. Contoh BUMN infrastruktur pada sektor perhubungan di bidang prasarana perhubungan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia.

Menurut Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, bahwa BUMN infrastruktur adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidangnya meliputi:

1. Pembangunan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.

2. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang ataupun penumpang baik laut, udara atau kereta api.
3. Jalan dan jembatan tol, dermaga pelabuhan laut atau sungai dan danau, lapangan terbang dan bandara.
4. Bendungan dari irigasi.

2.1.7 Tingkat Kesehatan BUMN Infrastruktur

Penjelasan-penjelasan dalam sub bab ini berupa: tingkat kesehatan BUMN Infrastruktur sebagai ukuran kinerja BUMN Infrastruktur, penggolongan tingkat kesehatan BUMN Infrastruktur dan aspek-aspek penilaian tingkat kesehatan BUMN Infrastruktur.

2.1.7.1 Kesehatan BUMN Infrastruktur Sebagai Ukuran Kinerja BUMN Infrastruktur

Menurut Schermerhorn dkk dalam Rivai dan Basri (2005; 15), bahwa “Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan”.

Penilaian kinerja perusahaan, khususnya bagi BUMN infrastruktur yang berbentuk Persero di Indonesia, ditetapkan pada setiap tahun oleh RUPS yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Penilaian terhadap ke tiga aspek ini membentuk penilaian kinerja BUMN Infrastruktur yang bersangkutan dan disebut dengan istilah tingkat kesehatan BUMN infrastruktur sebagaimana dalam Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002.

2.1.7.2 Penggolongan Tingkat Kesehatan BUMN Infrastruktur

Tingkat kesehatan BUMN infrastruktur dapat dinilai sehat, kurang sehat atau tidak sehat, tergantung pada perolehan total skor (TS) oleh masing-masing BUMN Infrastruktur.

Menurut Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, bahwa penilaian tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi:

1. SEHAT, yang terdiri dari:
 - a. AAA apabila TS lebih besar dari 95
 - b. AA apabila $80 < TS \leq 95$
 - c. A apabila $65 < TS \leq 80$
2. KURANG SEHAT, yang terdiri dari:
 - a. BBB apabila $50 < TS \leq 65$
 - b. BB apabila $40 < TS \leq 50$
 - c. B apabila $30 < TS \leq 40$
3. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari:
 - a. CCC apabila $20 < TS \leq 30$
 - b. CC apabila $10 < TS \leq 20$
 - c. C apabila $TS \leq 10$

2.1.7.3 Aspek-Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Infrastruktur

Penilaian tingkat kesehatan BUMN Infrastruktur dilakukan pada setiap tahun dan meliputi tiga aspek. Menurut Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002, bahwa tingkat kesehatan BUMN

ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi:

1. Aspek keuangan
2. Aspek operasional
3. Aspek administrasi

Walaupun demikian, Menurut Halim dkk (2003;204) bahwa kinerja perusahaan dapat dinilai berdasarkan aspek keuangan saja. Sesuai dengan judul, maka dalam tesis ini hanya akan dijelaskan tentang aspek keuntungan.

2.1.8 Aspek Keuangan dan Kinerja Keuangan

Dalam hal ini, istilah aspek keuangan dan kinerja keuangan merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama. Istilah aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menilai kinerja BUMN atau disebut tingkat kesehatan BUMN sebagaimana dalam Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/21002, sedangkan istilah kinerja keuangan biasa digunakan secara umum.

Penjelasan-penjelasan dalam sub bab ini berupa: pengertian dan bidang keuangan, indicator-indikator aspek keuangan dan kinerja keuangan.

2.1.8.1 Pengertian dan Bidang Keuangan

Menurut Gitosudarmo dan Basri (2004; 4-5), bahwa keuangan merupakan suatu fungsi dari suatu perusahaan memperhatikan pada aliran uang di dalam, dari dalam dan luar ke dalam perusahaan. Sehubungan dengan pengertian keuangan, maka bidang keuangan meliputi:

1. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Perbankan merupakan lembaga yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat sumber dan, penyimpanan dan mitra bagi perusahaan yang *go public*. Lembaga keuangan lainnya merupakan bidang keuangan yang dapat dimanfaatkan, antara lain untuk asuransi, lembaga pemberi modal (modal ventura) dan lain-lain.
2. Pasar modal merupakan lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk memperjualbelikan sekuritas dalam rangka khususnya mencari sumber dana.
3. Manajemen keuangan perusahaan. Bidang keuangan ini meliputi bagaimana memperoleh dana yang efisien dan membelanjakan untuk operasi yang efisien dan untuk investasi yang menguntungkan.

2.1.8.2 Indikator-Indikator Aspek Keuangan

Menurut Lampiran Salinan Keputusan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, bahwa penilaian tingkat kesehatan berdasarkan aspek keuangan terdiri dari atas 8 (Delapan) indikator dengan total bobot bagi semua indikator sebesar 50 untuk BUMN infrastruktur.

Tabel 1.1 Daftar indikator dan aspek keuangan (Lampiran Salinan Keputusan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penelitian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara)

Indikator	Bobot	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15
2. Imbalan investasi	10
3. Rasio kas	3
4. Rasio lancar	4
5. <i>Collection</i> periode	4
6. Perputaran persediaan	4
7. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6
Total Bobot	50

Berikut ini penjelasan masing-masing indikator tentang rumus definisi dan daftar skor penilaian.

a. Imbalan kepada pemegang saham/*return on equity* (ROE)

Menurut lampiran salinan keputusan menteri bahan usaha milik negara Nomor:KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, bahwa:

Rumus :

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Definisi :

1. Laba setelah pajak adalah laba setelah pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari:
 - a. Aktiva tetap
 - b. Aktiva nonproduktif

- c. Aktiva lain-lain
- d. Saham penyertaan langsung

2. Modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi aktif tahun buku dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam modal tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
3. Aktiva tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku aktiva tetap yang sedang dalam tahap penimbangan.

Daftar skor penilaian:

Tabel 1.2 Daftar skor penilaian ROE (Lampiran Salinan Keputusan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara

ROE (%)	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
15 < ROE	15
13 < ROE <= 115	13,5
11 < ROE <= 13	12
9 < ROE <= 11	10,5
7,9 < ROE <= 9	9
6,6 < ROE <= 7,9	7,5
5,3 < ROE <= 6,6	6
4 < ROE <= 5,3	5
2,5 < ROE <= 4	4
1 < ROE <= 2,5	3
0 < ROE <= 1	1,5
ROE < 0	1

b. Imbalan investasi/*Return On Investment ROI*

Menurut Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:

KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha

Milik Negara, bahwa:

Rumus :

$$ROI = \frac{EBIT + Penyusunan}{Capital\ Employed} \times 100\%$$

Definisi :

1. EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan:
 - a. Aktiva Tetap
 - b. Aktiva lain-lain
 - c. Aktiva Nonproduktif
 - d. Saham Penyertaan Langsung
2. Penyusunan adalah depresiasi, amortisasi
3. *Capital employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Daftar skor penilaian :

Tabel 1.3 Daftar skor penilaian ROI (Lampiran Salinan Keputusan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara)

ROI (%)	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
18 < ROI	10
15 < ROI ≤ 18	9
13 < ROI ≤ 15	8
12 < ROI ≤ 13	7
10,5 < ROI ≤ 12	6
9 < ROI ≤ 10,5	5
7 < ROI ≤ 9	4
5 < ROI ≤ 7	3,5
3 < ROI ≤ 5	3
1 < ROI ≤ 3	2,5
0 < ROI ≤ 1	2
ROI < 0	0

c. Rasio kas/Cash Ratio

Menurut Lampiran Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara:

Rumus :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

1. Kas, Bank dan Surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
2. *Current Liabilities* adalah sisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Daftar skor penilaian:

Tabel 1.4 Daftar skor penilaian *cash ratio* (Lampiran Salinan Keputusan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara)

Cash Ratio = X (%)	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
X ≥ 35	3
25 ≥ X > 35	2,5
15 ≥ X > 25	2
10 ≥ X > 15	1,5
5 ≥ X > 10	1
0 ≥ X > 5	0

d. Rasio lancar/ *curren ratio*

Menurut Lampiran Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara bahwa:

Rumus :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

1. *Current Asset* adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun buku
2. *Current Liabilities* adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Daftar skor penilaian :

Tabel 1.5 Daftar skor penilaian *current ratio* (Lampiran Salinan Keputusan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara)

Current Ratio = X (%)	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
125 = < X	3
110 <= X < 125	2,5
100 <= X < 110	2
95 <= X < 100	1,5
90 < X < 95	1
0 X < 90	0

e. *Collection Period* (CP)

Menurut Lampiran Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara bahwa:

Rumus :

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan}} \times 365 \text{ Hari}$$

Definisi :

1. Total piutang usaha adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi Candangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun.
2. Total pendapatan usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku.

Daftar skor penilaian :

Tabel 1.6 Daftar skor penilaian Daftar skor penilaian Perputaran Persediaan (Lampiran Salinan Keputusan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara)

PP = X (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infrastruktur	Non Infrastruktur
$X \leq 60$	$35 > X$	4
$60 < X \leq 90$	$30 < X \leq 35$	3,5
$90 < X \leq 120$	$25 < X \leq 30$	3
$120 < X \leq 150$	$20 < X \leq 25$	2,5
$150 < X \leq 180$	$15 < X \leq 20$	2
$180 < X \leq 210$	$10 < X \leq 15$	1,6
$210 < X \leq 240$	$6 < X \leq 10$	1,2
$240 < X \leq 270$	$3 < X \leq 3$	0,8
$270 < X \leq 300$	$1 < X \leq 3$	0,4
$300 < X$	$0 < X \leq 1$	0

f. Perputaran Persediaan (PP)

Menurut Lampiran Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor: KEP-100/MBU/2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan

Usaha Milik Negara bahwa:

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ Hari}$$

Definisi :

1. Total persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cabang.
2. Total pendapatan usaha adalah total pendapatan usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Daftar skor penilaian :

Tabel 1. 7 Daftar skor penilaian Perputaran Total Aset/Total Asset Turnover (TATO). (Lampiran Salinan Keputusan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara).

TATO = X (hari)	Perbaikan (%)	Skor	
		Infrastruktur	Non Infrastruktur
$120 \leq X$	$20 < X$	4
$150 < X \leq 120$	$15 < X \leq 20$	3,5
$90 < X \leq 105$	$10 < X \leq 15$	3
$75 < X \leq 90$	$5 < X \leq 10$	2,5
$60 < X \leq 75$	$0 < X \leq 5$	2
$40 < X \leq 60$	$X \leq 0$	1,5
$20 < X \leq 40$	$X < 0$	1
$X \leq 20$	$X < 0$	0,5

- g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

Menurut Lampiran Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara bahwa:

Rumus :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi :

1. Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk hasil penjualan Aktiva Tetap.
2. *Capital Employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 1. 8 : Daftar skor penilaian perputaran total Asset.

TATO = X (%)	Perbaikan = X (%)	Skor	
		Infrastruktur	Non Infrastruktur
120 < X	20 < X	4	5
105 < X <= 120	15 < X <= 20	3,5	4,5
90 < X <= 105	10 < X <= 15	3	4
75 < X <= 90	5 < X <= 10	2,5	3,5
60 < X <= 75	0 < X <= 5	2	3
40 < X <= 60	X <= 0	1,5	2,5
20 < X <= 40	X < 0	1	2
X <= 20	X < 0	0,5	1,5

- h. Rasio total modal sendiri terhadap *total asset* (TSM terhadap TA)

Menurut Lampiran Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara bahwa:

Rumus :

$$\text{TSM terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :

1. Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku di luar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
2. Total Asset adalah Total Asset dikurangi dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Daftar skor penilaian:

Tabel 1.9 Daftar skor penilaian modal sendiri terhadap total asset (Lampiran Salinan Keputusan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara)

TMS terhadap TA (%) = X	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
X < 0	0
0 <= X < 10	2
10 <= X < 20	3
20 <= X < 30	4
30 <= X < 40	6
40 <= X < 50	5,5
50 <= X < 60	5
60 <= X < 70	4,5
70 <= X < 80	4,25
80 <= X < 90	4
90 <= X < 100	3,5

2.1.9 Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerjaan melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyelenggaraan program jaminan

sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminann Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT

Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.1.10 Prinsip BPJS Ketenagakerjaan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). SJSN diselenggarakan berdasarkan 3 (tiga) asas, yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Asas keadilan merupakan asas yang bersifat ideal. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

SJSN merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SJSN

bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

SJSN diselenggarakan berdasarkan pada 9 (sembilan) prinsip:

1. Kegotong-royongan; prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.
2. Nirlaba; prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
3. Keterbukaan; prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.
4. Kehati-hatian; prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
5. Akuntabilitas; prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Porfitabilitas; prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepesertaan bersifat wajib; prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
8. Dana amanat; bahwa iuran dan pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta; bahwa hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

2.1.11 Jenis-jenis BPJS Ketenagakerjaan

Sebenarnya apa itu BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam UU No 40 Tahun 2004 terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dahulu, BPJS Ketenagakerjaan bernama PT.Jamsostek. Namun, sejak 1 Januari 2014 namanya berganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi, apa saja 4 jenis BPJS Ketenagakerjaan itu? Berikut pembahasannya:

1. Program Jaminan Hari Tua (JHT)
 - a. JHT bertujuan untuk menjamin para pekerja untuk tidak mengalami kesulitan ekonomi. Terutama ketika para peserta JHT sudah memasuki masa tuanya.
 - b. JHT bisa dicairkan sebesar 10% atau 30% jika masih berstatus aktif sebagai pekerja dan mempunyai total waktu bekerja selama 10 tahun.

c. JHT bisa dicairkan sebesar 100% jika status pekerja sudah tidak aktif, baik karena sudah di PHK atau mengundurkan diri, terhitung sejak 1 bulan setelah status kepesertaannya tidak aktif.

d. Besaran Iuran adalah 5,7% dari besaran gaji (3,7% dibayarkan perusahaan/pemberi kerja dan 2% dibayarkan oleh pekerja)

2. Progam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Peserta JKK mendapatkan manfaat perlindungan total berupa biaya medis dan kompensasi jika terjadi kecelakaan saat berada di lingkungan kerja, mendapatkan penyakit karena lingkungan kerja ataupun mengalami cacat permanen akibat kecelakaan kerja. Contoh: seorang reporter, saat sedang ingin liputan di suatu tempat, ia mengalami kecelakaan. Maka D berhak mendapatkan santunan tunai dari JKK.

a. JKK *mengcover* perawatan intensif (ICU/UGD), penunjang diagnostik, pelayanan khusus, alat kesehatan dan implan, jasa dokter, operasi, transfusi darah, dan rehabilitasi medis meliputi penggantian alat bantu (orthose), alat pengganti (prothese), dan gigi tiruan.

b. JKK juga akan memberikan beasiswa pendidikan bagi anak anak peserta JKK yang meninggal dunia/cacat total yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit karena pekerjaan, sebesar Rp12.000.000.

c. Besaran iuran dari JKK untuk para peserta penerima upah: Untuk tingkat risiko paling rendah, besaran iuran JKK adalah 0,24% dari upah sebulan Untuk tingkat risiko rendah, besaran iuran JKK adalah 0,54% dari upah sebulan Untuk tingkat risiko sedang, besaran iuran

JKK adalah 0,89% dari upah sebulan Untuk tingkat risiko tinggi, besaran iuran JKK adalah 1,27% dari upah sebulan Untuk tingkat risiko sangat tinggi, besaran iuran JKK adalah 0,74% dari upah sebulan.

3. Program Jaminan Kematian (JKM)

Manfaat JKM akan diberikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan, ketika peserta meninggal dunia yang bukan disebabkan kecelakaan kerja atau penyakit karena pekerjaan. Syaratnya, peserta masih dalam status aktif bekerja atau belum mencapai masa pensiun (56 tahun).

- a. Bentuk Kompensasi JKM berupa santunan tunai dan biaya pemakaman.
- b. Santunan tunai sebesar Rp 16.200.000 dan santunan berkala 24 kalixRp200.000, atau Rp 4.800.000 yang dibayar sekaligus.
- c. Bagi peserta yang sudah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan minimal 5 tahun, akan mendapat biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000 dan beasiswa pendidikan untuk anaknya sebesar Rp12.000.000.

4. Program Jaminan Pensiun (JP)

Tujuan JP adalah untuk menjamin kehidupan lebih layak bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan saat sudah memasuki masa pensiunnya, yaitu pada umur 56 tahun.

- a. Iurannya sebesar 3% (2% dibayarkan oleh perusahaan/pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh pekerja)

- b. Dana akan diberikan setiap bulannya kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan selama masih hidup setelah usia 56 tahun.
- c. Bisa didapatkan ketika sudah menjadi peserta aktif dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan minimal 15 tahun lamanya.

2.1.12 Sumber Aset Modal BPJS Ketenagakerjaan

Sumber Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 15

1. Sumber aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk bantuan iuran;
 - b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 - c. aset program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak peserta PT. Jamsostek (Persero); dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk bantuan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari

semua penambahan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan hasil dari penempatan Investasi maupun bukan investasi.

4. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil pengalihan aset program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. aset program jaminan kecelakaan kerja yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja;
 - b. aset program jaminan hari tua yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial hari tua; dan
 - c. aset program jaminan kematian yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial kematian.
5. Jumlah aset program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit sebesar jumlah liabilitas kepada peserta pada saat pengalihan aset PT.Jamsostek (Persero) menjadi aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
6. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dana yang berasal dari:
 - a. Surplus aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan program;
 - b. Surplus aset BPJS Ketenagakerjaan;

- c. dana talangan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat; dan/atau
 - d. hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

2.1.13 Tujuan BPJS Ketenagakerjaan dan Program Jaminan Sosial

Tujuan BPJS dan Program Jaminan Sosial, Tujuan sebuah negara adalah menciptakan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Dalam hal ini, maka Indonesia membentuk penyelenggaraan jaminan social yaitu BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial). Yang dimana tujuan dari Institut ini memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Sebelum BPJS tertentu, beberapa program jaminan social telah terbentuk, seperti Jaminan social Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang mencakup tentang jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi tenaga kerja. Selanjutnya Jaminan untuk pegawai Negeri yaitu TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dan ASKES (Asuransi Keseshatan dan untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan PNS Kementerian Pertahanan /TNI / Polri beserta keluarganya telah dilaksanakan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Indonesia (ASABRI).

Namun Sebagian besar masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai dengan program-program diatas. Perlu adanya sasaran yang lebih luas lagi dan manfaat yang lebih besar pada setiap peserta. Oleh karena itu, di bentuklah BPJS yang diharapkan menjadi penyempurna dari program – program jaminan social tadi. Yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan adanya BPJS Kesehatan ini pelayanan medis bisa lebih jeli dan teliti mengidentifikasi masalah pasien dan melakukan tindakan/pemeriksaan sesuai dengan indikasinya, karena BPJS membiayai sesuai dengan diagnosa penyakit dan telah dihitung pemeriksaan yang dilakukan sesuai indikasi. Namun, dampak dari BPJS ini adalah ke dokter juga, yaitu penetapan biaya yang sesuai belum ditentukan. Sejalan dengan BPJS yang sekarang sedang hangatnya di perbincangkan, yang merupakan agenda unggulan dari Presiden baru kita Jokowi, yaitu KIS (Kartu Indonesia Sehat) dimana KIS dan BPJS mempunyai tujuan yang sama hanya cakupan peserta KIS lebih besar dari Jumlah peserta JKN. JKN (jaminan Kesehatan Nasional) merupakan program yang dikelola oleh BPJS sebelumnya. Peserta KIS merupakan peserta yang termasuk dalam daftar JKN, hanya KIS menambah cakupannya yaitu peserta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan bayi baru lahir dari orang tua peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Perluasan manfaat KIS, sinergis dan terintegrasinya pelayanan kesehatan perorangan dengan promotif, preventif, skrining yang diatur lebih lanjut secara teknis. KIS dapat dikatakan sebagai penyempurna bagi BPJS, sehingga diharapkan adanya sinkronisasi antara BPJS dan KIS, sesuai dengan perkataan

Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan “KIS itu adalah sebuah system, sedangkan BPJS adalah sebuah badan yang mengelolah system”. Namun, penerapan KIS ini belum diketahui pasti, apakah berjalan baik seperti BPJS yang hampir 1 tahun telah berjalan.

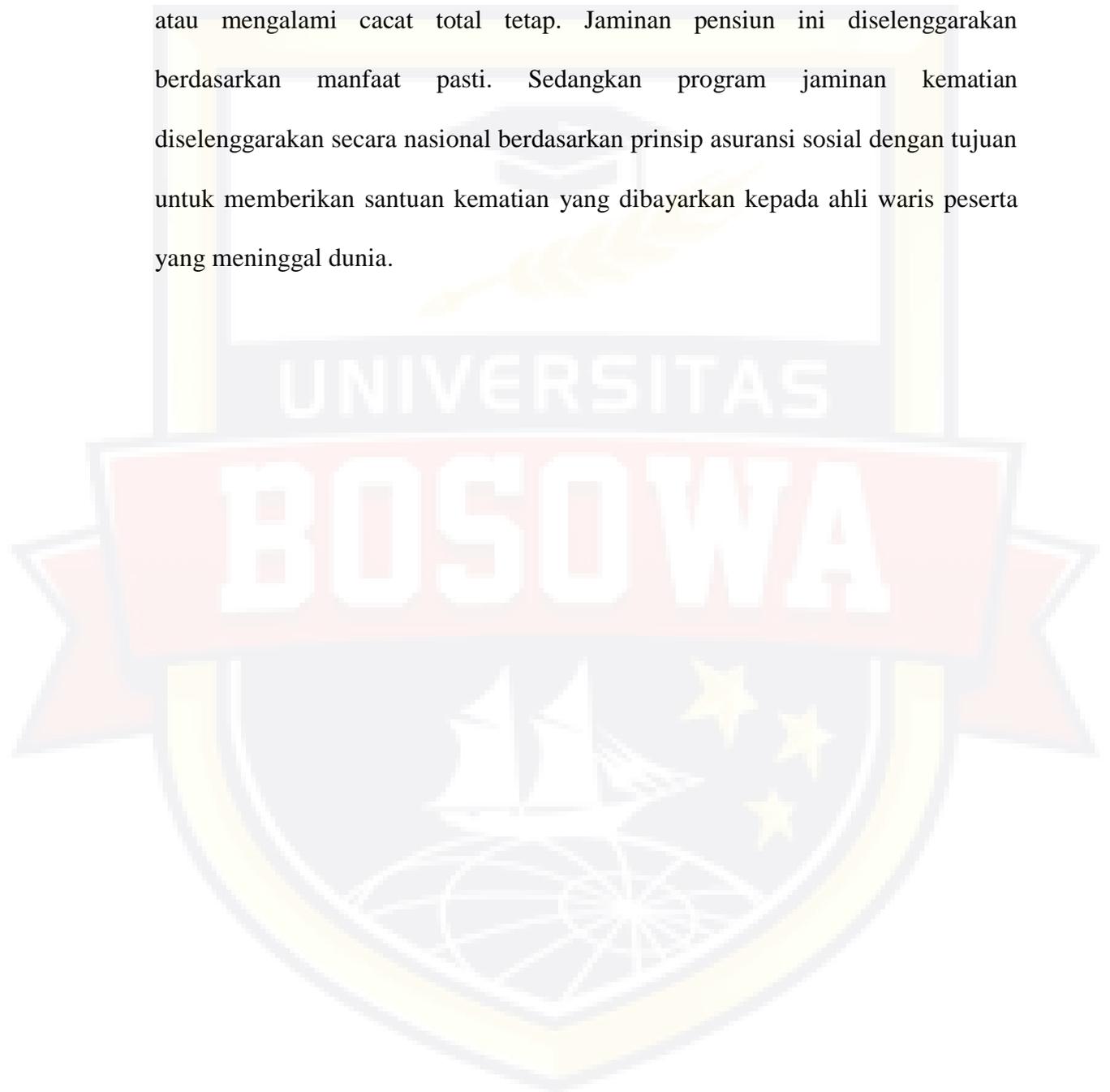
2.1.14 Fungsi BPJS Ketenagakerjaan

UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Menurut UU SJSN program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau

tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.



2.2 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan berbagai acuan teori yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.” Diduga bahwa Analisis kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015-2017 berada pada kondisi yang sehat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan Indonesia Cabang Makassar yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo Km. 4,5 Pampang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231 Tlp perusahaan/instansi 0411-441581. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2019.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan tentang kinerja keuangan Indonesia.
 - b. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari BPJS dalam bentuk laporan keuangan Indonesia.
2. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari dokumentasi dan laporan tertulis yang meliputi data perkembangan neraca dan laba rugi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian dengan membaca buku-buku, literatur, laporan – laporan tertulis, dan tulisan – tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dibahas.

2. Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data – data berupa dokumen atau informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, seperti dokumen profil BPJS.

3.4 Metode Analisis

Berdasarkan rumusan adalah dan hipotesis yang telah dikemukakan, maka peneliti menggunakan metode analisis rasio keuangan, baik berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002. Analisis Rasio berdasarkan Kepmen BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 :

- a. *Return on Equity* (ROE)

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Total Penjualan}} \times 100 \%$$

- b. Imbalan Investasi/*Return on Investment* (ROI)

$$\text{Return on Investment (ROI)} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

- c. Rasio Kas/*Cash Ratio*

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash} + \text{Bank} + \text{Surat berharga jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

- d. Rasio lancar

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Capital Liabilities}} \times 100 \%$$

- e. *Collection Periods* (CP)

$$\text{CP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

- f. Perputaran Total Asset/ *Total Asset Turn Over* (TATO)

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

- g. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap total Asset

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

3.5 Definisi Operasional

1. Laporan Keuangan merupakan sebuah data keuangan dari koperasi yang mencakup neraca maupun laporan sisa hasil usaha yang bisa digunakan sebagai penggambaran kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan Indonesia.
2. Kinerja Keuangan adalah hasil aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Indonesia yang dapat memberikan oleh seluruh komponen perusahaan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan untuk satu periode.
3. *Return on Equity* (ROE) adalah indikator yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Indonesia untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pengelolaan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba pada satu periode.
4. *Return on Investment* merupakan indikator/alat ukur yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan bersih.
5. *Cash Ratio* adalah indikator yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan

kas, bank, dan surat berharga untuk membayar hutang jangka pendek perusahaan.

6. *Current Ratio* merupakan indikator penilaian yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia untuk mengetahui kesanggupan memenuhi hutang jangka pendek perusahaan, serta dianggap dapat menunjukkan masalah dalam likuiditas perusahaan.
7. *Collection Periods* adalah indikator penilaian kinerja keuangan perusahaan yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Indonesia untuk mengukur jumlah rata-rata waktu yang diperlukan untuk menagih suatu tagihan setelah melakukan penjualan.
8. Perputaran persediaan adalah ukuran yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Indonesia untuk mengukur kemampuan total pendapatan usaha yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu.
9. *Total Aset Turn over* merupakan indikator yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Indonesia sebagai ukuran terhadap total pendapatan perusahaan yang tertanam dalam keseluruhan aktiva dalam rangka menghasilkan penjualan, serta menggambarkan berapa rupiah penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan.
10. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset merupakan indikator penilaian kerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia untuk

mengetahui persentase perbandingan antar modal sendiri dengan harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.

4.1.1. Sejarah Singkat BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja,

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat

2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut,

BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya

memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

4.1.2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

b. Misi

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk :

- a. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
- c. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional

4.1.3. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan

Sebagai program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

4.1.4. Arti Logo BPJS Ketenagakerjaan

Gambar 4.1



1. HIJAU

- a. Warna hijau melambangkan kesejahteraan.
- b. Warna hijau diharapkan dapat merepresentasikan nilai-nilai pertumbuhan, harmoni, kesegaran, stabilitas dan keamanan.

2. PUTIH

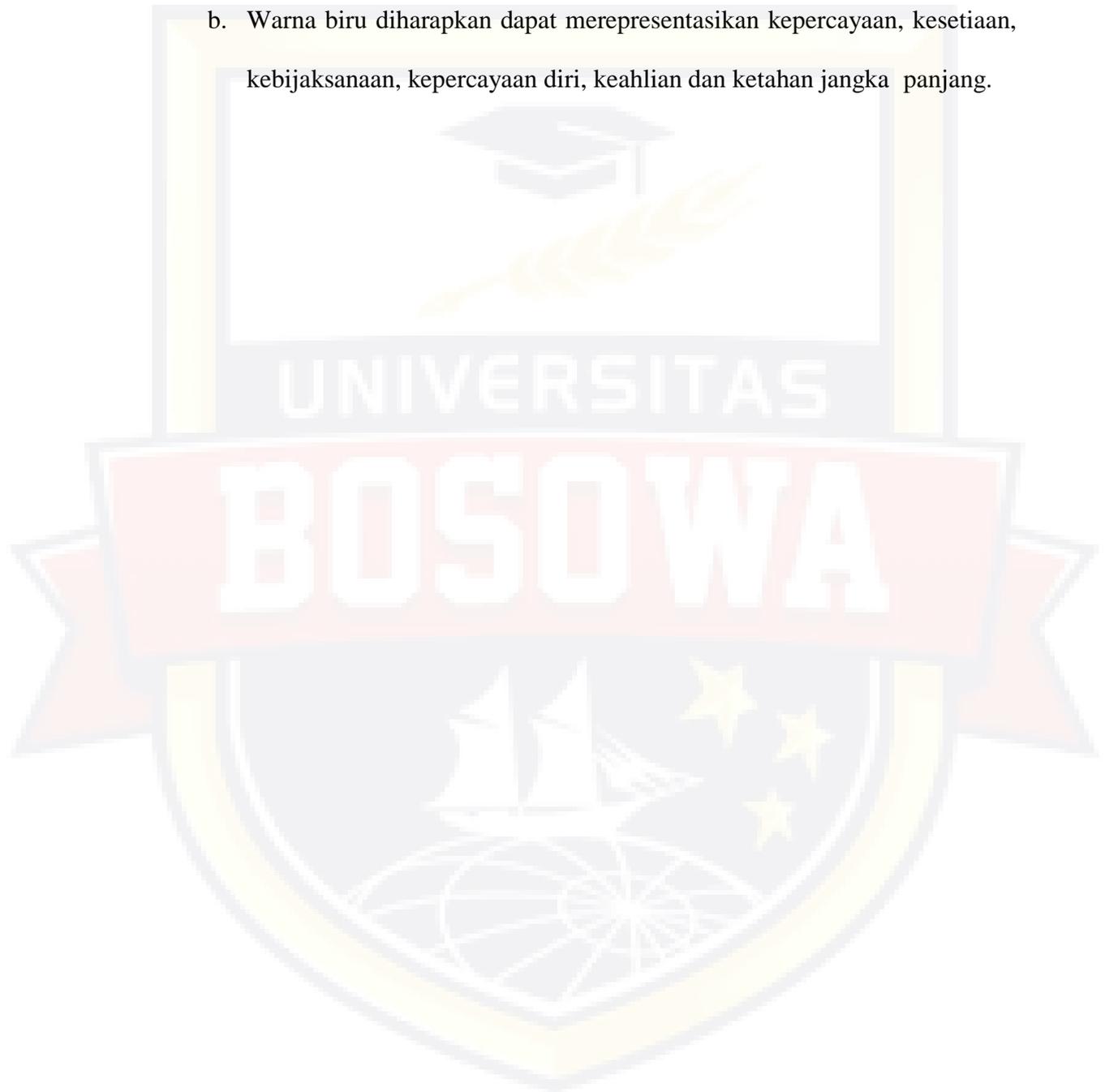
- a. Warna putih melambangkan integritas.
- b. Warna putih diharapkan dapat merepresentasikan kemurnian, kebersihan dan kesempurnaan sebagai *symbol* kebaikan.

3. KUNING

- a. Warna kuning melambangkan optimis.
- b. Warna kuning diharapkan dapat merepresentasikan optimism, pencerahan dan kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik.

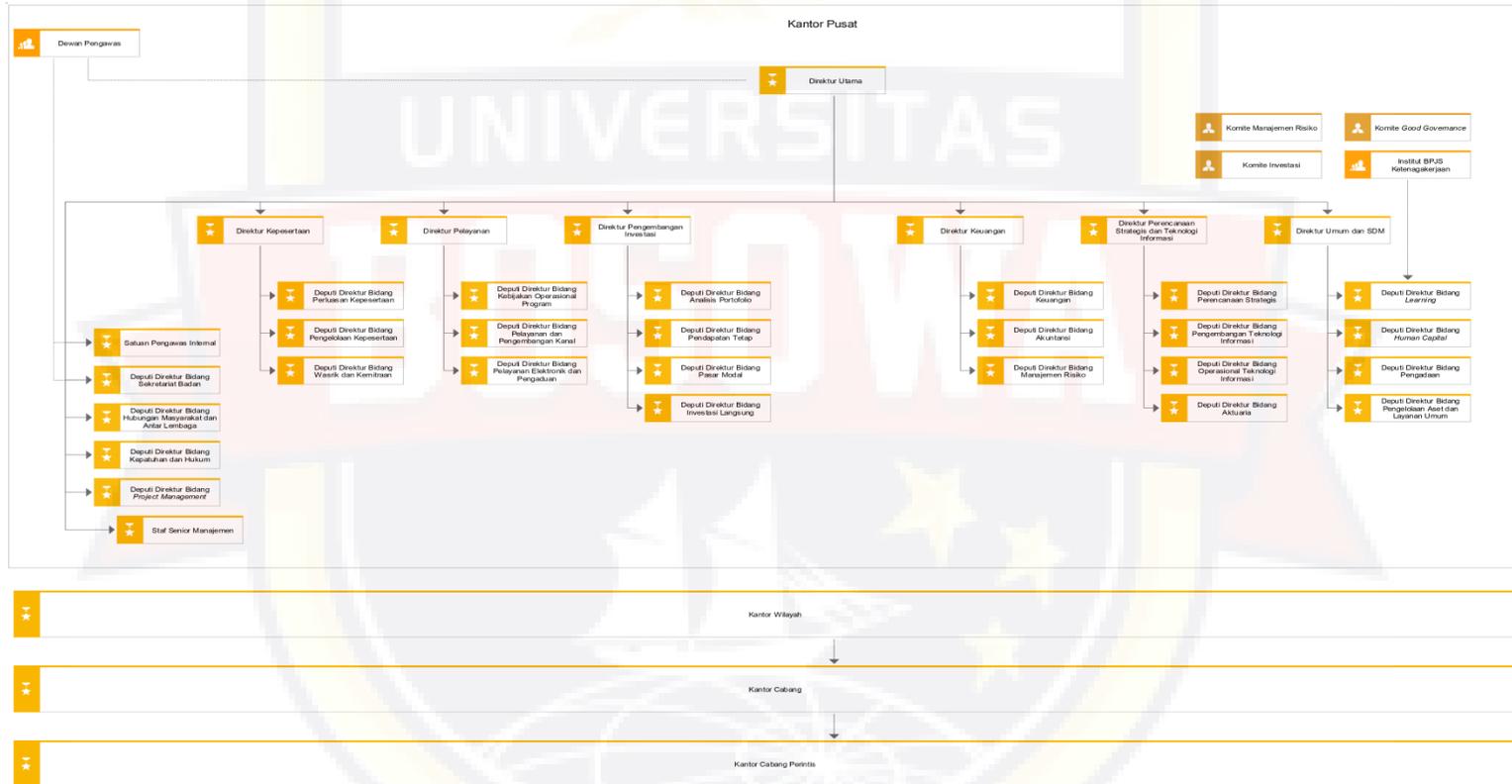
4. BIRU

- a. Warna biru melambangkan keberlanjutan.
- b. Warna biru diharapkan dapat merepresentasikan kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, kepercayaan diri, keahlian dan ketahanan jangka panjang.



4.1.5. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI BPJS KETENAGAKERJAAN



4.1.6. Uraian Tugas BPJS Ketenagakerjaan Indonesia

Berdasarkan Struktur Organisasi, maka uraian tugas pada BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama

Direktur utama merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang berkewajiban untuk:

- a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi
- b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) atau wakil direktur
- c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi
- d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan atau institusi

2. Direktur Kepesertaan

Untuk mengembangkan kepesertaan) dan pembinaan kepada peserta di sektor informal dan jasa konstruksi, memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat, guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran informal yang telah dibebankan dan untuk menjaga kepuasan peserta.

- a. Tanggung jawab utama pengelolaan organisasi
 - 1) Melaksanakan penilaian kinerja sesuai prosedur, guna memperoleh hasil penilaian yang valid dan akurat.

- 2) Melaksanakan peraturan perusahaan/perundangan, sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance.

b. Tanggung jawab pengelolaan operasional

- 1) Mengumpulkan informasi mengenai data peserta di lingkup tugasnya, untuk dikompilasi Penata Madya Administrasi Informal Khusus sebelum diajukan kepada atasan sebagai data potensi.
- 2) Melaksanakan kegiatan pemasaran, guna meningkatkan perluasan kepesertaan sesuai target yang menjadi bebannya
- 3) Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta, guna meningkatkan iuran kepesertaan sesuai target yang menjadi bebannya
- 4) Memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta, guna menjaga kepuasan peserta, dengan cara :
- 5) Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja.

3. Direktur Pelayanan

- a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang Pelayanan, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidang Pelayanannya
- b. Mengkoordinasikan proses Penetapan Jaminan, guna memperoleh besaran jaminan yang akurat
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan bagi peserta, agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan

- d. Mengkoordinasikan penyelesaian keluhan peserta, guna meningkatkan kepuasan peserta
- e. Memantau kinerja petugas pelayanan (Customer Service), untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan yang telah ditetapkan
- f. Menyusun laporan kegiatan guna mendukung penyusunan laporan kegiatan cabang.

4. Direktur Pengembangan investasi

- a. untuk mengelola kumpulan dana investasi yang berasal dari para investor, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal.
- b. memutuskan dan memilih instrumen investasi dimana dana-dana tersebut akan ditempatkan, seperti deposito, surat berharga atau obligasi, dan saham, yang nantinya akan menjadi sebuah portofolio investasi.
- c. Bekerja sama dengan direktur lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.
- d. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efisien dan se-efektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan direktur lainnya.
- e. Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.

- f. Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana serta hasil penilaian yang valid dan akurat

5. Direktur Keuangan

- a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang Keuangan & TI Cabang kelas 1 Keuangan & TI, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidang Keuangan & TI Cabang Kelas 1nya
- b. Mengkomplikasikan rencana anggaran tiap Unit kerja, untuk memperoleh acuan dalam pengelolaan dana
- c. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan, agar kegiatan operasional cabang dapat berjalan lancar, efektif dan efisien
- d. Mengkoordinasikan pencatatan transaksi keuangan, untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan Kantor Cabang, untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan.

6. Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi

Melaksanakan pengaturan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan hardware, software dan jejaring, serta mengelola database dan aplikasi, guna mengoptimalkan pengoperasian perangkat sistem informasi untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada peserta dan untuk efektivitas kegiatan operasional.

1. Tanggung jawab utama pengelolaan organisasi
 - a. Melaksanakan penilaian kinerja sesuai prosedur, guna memperoleh hasil penilaian yang valid dan akurat.
 - b. Melaksanakan peraturan perusahaan/perundangan, sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance.
2. Tanggung jawab utama pengelolaan operasional
 - a. Menyediakan sarana TI, sebagai dukungan kepada kegiatan operasional, dengan cara:
 - 1) Mengumpulkan data tentang kebutuhan TI (perangkat keras dan lunak)
 - 2) Mengevaluasi kebutuhan.
 - 3) Mengusulkan rencana pemenuhan kebutuhan.
 - 4) Melakukan koordinasi pemenuhan kebutuhan.
 - b. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin sarana prasarana teknologi informasi (perangkat keras, jejaring komputer, perangkat lunak aplikasi, serta database), guna mengoptimalkan kelangsungan operasional dengan downtime yang minimal, dengan cara:
 - 1) Menyusun jadwal pemeliharaan dan menginformasikannya kepada penggunaan data.
 - 2) Melaksanakan pemeliharaan.
 - c. Melakukan pengaturan kewenangan pemakaian sistem disesuaikan dengan tingkatan pengguna, guna menjaga keamanan sistem aplikasi dan database, dengan cara :

- 1) Mengumpulkan data/informasi mengenai tingkat kewenangan dalam hal penggunaan data.
 - 2) Membuat sistem pembatasan akses ke data.
 - 3) Mengatur penggunaan.
 - 4) Melakukan sosialisasi pengaturan.
- d. Melaksanakan perbaikan atas permasalahan/kerusakan yang timbul pada perangkat keras, jejaring komputer, perangkat lunak aplikasi, serta database, guna memberikan dukungan teknis bagi kelancaran pengelolaan sistem, dengan cara :
- 1) Mendata keluhan yang masuk.
 - 2) Melakukan tindakan perbaikan sesuai batas kewenangannya.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah untuk gangguan yang bersifat sentral.
- e. Melaksanakan pengelolaan data (perekaman, recovery, dan pengolahan) dari database yang tersedia, guna menghasilkan data yang valid dan akurat, dengan cara :
- 1) Melakukan back-up data secara rutin.
 - 2) Menyediakan kebutuhan data bagi user.
- f. Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggung jawaban atas kegiatan kerja.

7. Direktur Umum dan SDM

- a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang SDM & Umum, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya
- b. Mengelola pemenuhan kebutuhan SDM, guna memastikan efektivitas penempatan di Cabang sesuai dengan spesifikasi jabatan
- c. Mengelola kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, untuk mendukung tercapainya standar kompetensi yang dipersyaratkan
- d. Memantau kinerja dan mengelola hubungan industrial dilingkungan Kantor Cabang, guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
- e. Mengelola pemenuhan hak pegawai di Kantor Cabang dengan mengacu pada peraturan yang berlaku (antara lain gaji, fasilitas kesehatan, asuransi, dll) sehingga hak dapat diberikan tepat jumlah dan tepat waktu.

4.2 Deskripsi Data

Laporan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan disusun dalam bentuk neraca dan laporan laba bersih untuk setiap periode/akhir tahun. Neraca memperlihatkan atau menggambarkan keadaan posisi keuangan BPJS yang meliputi tentang aktiva, hutang, dan ekuitas pada setiap akhir periode. Sedangkan laba bersih merupakan laporan yang memperlihatkan pendapatan yang diperoleh oleh BPJS serta biaya-biaya yang terjadi selama periode tertentu.

Laporan keuangan disusun secara lengkap dan disertai dengan penjelasan-penjelasan agar pemakai laporan keuangan tersebut mengerti tentang laporan keuangan yang disusun oleh bagian akuntansi. Jadi laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang informatif atau dapat dimengerti oleh setiap pengguna laporan keuangan tersebut.

Sehubungan dengan penelitian, maka penulis memfokuskan pada laporan keuangan BPJS terdiri dari:

1. Neraca Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan per 31 Desember 2016 sampai dengan per 31 Desember 2018.
2. Laporan laba bersih Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk tahun 2015-2017.

4.3 Analisis Data

Dalam menilai aspek keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, maka berdasarkan neraca perbandingan dan laporan laba rugi perbandingan, berikut ini disajikan analisa rasio berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002.

- a. Return on Equity (ROE)

$$ROE = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{modal sendiri}} \times 100\%$$

$$ROE(2015) = \frac{624.615.414.495}{8.912.939.459.826} \times 100\%$$

$$= 0,07 \text{ atau } 7\%$$

$$ROE(2016) = \frac{1.072.534.600.809}{10.424.740.227.906} \times 100\%$$

$$= 0,10 \text{ atau } 10 \%$$

$$ROE(2017) = \frac{1.299.523.515.598}{11.921.127.291.696} \times 100\%$$

$$= 0,10 \text{ atau } 10 \%$$

Artinya setiap modal sendiri menghasilkan laba setelah pajak sebagai calon deviden sebesar 0,07 atau 7% (yang berarti memperoleh skor 7,5) pada tahun 2015, dan meningkat ditahun 2016 sebesar 0,10 atau 10% (skor 10,5) ditahun 2017 tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,10 atau 10% (skor 10,5) akan tetapi meskipun tidak mengalami peningkatan ditahun 2016 atau 2017 laba setelah pajak dan modal sendiri setiap tahun meningkat sama halnya ditahun 2015.

b. Imbalan Investasi / Return on Investment (ROI)

$$ROI = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

$$ROI(2015) = \frac{624.615.414.495}{11.080.636.007.966} \times 100\%$$

$$= 0,05 \text{ atau } 5 \%$$

$$ROI(2016) = \frac{1.072.534.600.809}{13.369.970.895.524} \times 100\%$$

$$= 0,08 \text{ atau } 8 \%$$

$$ROI(2017) = \frac{1.229.523.515.598}{14.455.702.232.828} \times 100\%$$

$$= 0,08 \text{ atau } 8 \%$$

Artinya setiap Total Aktiva, maka Laba Setelah Pajak di tambah penyusutan sebesar 0,05 atau 5% (yang berarti memperoleh skor 3) pada tahun 2015, dan meningkat ditahun 2016 sebesar 0,08 atau 8% (skor 4) ditahun 2017 tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,08 atau 8% (skor 4) akan tetapi meskipun tidak mengalami peningkatan ditahun 2016 atau 2017 laba setelah pajak dan total aktiva setiap tahun meningkat sama halnya ditahun 2015.

c. Rasio Kas /*Cash Rasio*

$$\text{Cash Rasio} = \frac{\text{cash} + \text{bank} + \text{surat berharga jangka pendek}}{\text{current liabilities}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Cash Rasio}(2015) &= \frac{1.244.955.540.872}{913.705.890.139} \times 100\% \\ &= 1,36 \text{ atau } 136\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cash Rasio}(2016) &= \frac{1.042.826.293.596}{1.376.384.387.623} \times 100\% \\ &= 0,75 \text{ atau } 75\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cash Rasio}(2017) &= \frac{1.065.045.410.503}{1.109.289.868.958} \times 100\% \\ &= 0,96 \text{ atau } 96\% \end{aligned}$$

Artinya setiap utang lancar dijamin oleh alat-alat pelunasannya berupa kas, bank dan surat-surat berharga jangka pendek pada tahun 2015 sebesar 1,36 atau 136% (yang berarti memperoleh skor 3), tahun 2016 mengalami penurunan yaitu 0,75 atau 75% (skor 3) hal ini terjadi karena kas, bank dan surat-surat berharga jangka pendek mengalami penurunan yaitu dari 1.244.955.540.872

menjadi 1.042.826.293.596 kemudian ditahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 0,96 atau 96% (skor 3).

d. Rasio Lancar

$$\text{Current Rasio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{capital liabilities}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Current Rasio (2015)} &= \frac{7.310.709.056.605}{913.705.890.139} \times 100\% \\ &= 8,00 \text{ atau } 800\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Current Rasio (2016)} &= \frac{7.161.820.859.883}{1.376.384.387.623} \times 100\% \\ &= 5,20 \text{ atau } 520\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Current Rasio (2017)} &= \frac{7.097.014.436.297}{1.109.289.868.958} \times 100\% \\ &= 6,39 \text{ atau } 639\% \end{aligned}$$

Artinya setiap hutang lancar dijamin oleh alat-alat pelunasannya berupa seluruh aktiva lancar untuk tahun 2015 sebesar 8,00 atau 800% (yang berarti memperoleh skor 3) ditahun 2016 mengalami penurunan yaitu 5,20 atau 520% (skor 3) hal ini terjadi karena *current asset* ditahun 2016 menurun kemudian di tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 6,39 atau 639% (skor 3).

e. Collection Periods (CP)

$$\text{Collection Periods} = \frac{\text{total piutang usaha}}{\text{total pendapatan usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

$$\begin{aligned} \text{Collection Periods (2015)} &= \frac{125.725.834.113}{128.639.836.637} \times 365 \text{ hari} \\ &= 0,97 \text{ atau } 356 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Collection Periods (2016)} &= \frac{105.339.491.926}{4.680.064.727.673} \times 365 \text{ hari} \\ &= 0,02 \text{ atau } 8,21 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Collection Periods (2017)} &= \frac{81.860.325.739}{4.755.082.000.000} \times 365 \text{ hari} \\ &= 0,01 \text{ atau } 6,28 \text{ hari} \end{aligned}$$

Artinya:

- Hasil penagihan piutang usaha terjadi dalam tahun 2015 adalah 0,97 atau 356 hari (berarti memperoleh skor 0). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2,42 atau 884 hari, maka terjadi perbaikan cp sebesar -1,45 atau -528 hari (artinya skor 0). Berarti, skor yang dipilih adalah (0) pada tahun 2015 yaitu skor sangat rendah.
- Hasil penagihan piutang usaha terjadi pada tahun 2016 adalah 0,02 atau 8,21 hari (berarti memperoleh skor 1,2) bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi perbaikan CP selama 0,95 atau 347 hari (berarti memperoleh skor 0) berarti skor yang dipilih adalah skor 1,2 yaitu skor yang tertinggi. dilihat dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan yaitu 0,2 atau 8,21 hari hal ini terjadi karena total piutang usaha ditahun 2016 menurun.
- Hasil penagihan piutang usaha terjadi pada tahun 2017 adalah 0,01 atau 6,28 hari (berarti memperoleh skor 1,2) bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi perbaikan CP selama 0,01 atau 1,93 hari (berarti memperoleh skor 1,6). Berarti skor yang dipilih adalah 1,2

pada tahun 2017, yaitu skor tertinggi. dilihat dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan yaitu 0,01 atau 6,28 hari, hal ini terjadi karena total piutang usaha menurun dari 105.339.491.926 ke 81.860.325.739.

f. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

$$TATO = \frac{\text{total pendapatan}}{\text{capital employed}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} TATO (2015) &= \frac{128.639.836.637}{11.080.636.007.966} \times 100 \% \\ &= 0,01 \text{ atau } 1 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} TATO (2016) &= \frac{4.680.064.727.673}{13.369.970.894.524} \times 100 \% \\ &= 0,35 \text{ atau } 35\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} TATO (2017) &= \frac{4.755.082.000.000}{14.455.702.232.828} \times 100 \% \\ &= 0,32 \text{ atau } 32 \% \end{aligned}$$

Artinya:

- Setiap *Capital Employed* menghasilkan total pendapatan sebesar 1,01 atau 1% (berarti memperoleh skor 1) pada tahun 2015. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka TATO mengalami peningkatan 0,80 atau 8% (berarti skor 2,5) yaitu 0,21 atau 0,009% menjadi 1,01 atau 1%. Berarti skor yang dipilih adalah 2,5 pada tahun 2015 yaitu skor tertinggi.
- Setiap *Capital Employed* menghasilkan total pendapatan sebesar 0,35 atau 35% (berarti memperoleh skor 1) pada tahun 2016. Bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka TATO mengalami peningkatan -0,34 atau 0,006% (berarti skor 1) yaitu 1,01 atau 1% menjadi 1,35 atau 35%. Berarti skor yang dipilih adalah 1 pada tahun 2016 yaitu skor tertinggi. dilihat dari tahun 2015- ke 2016 mengalami peningkatan yang sangat drastis 0,35 atau 35% hal ini terjadi karena total pendapatan dan *capital employed* mengalami peningkatan.

- Setiap *Capital Employed* menghasilkan total pendapatan sebesar 0,32 atau 32% (berarti memperoleh skor 1) pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka TATO mengalami peningkatan 1,03 atau 0,23% (berarti skor 1) yaitu 0,32 atau 32% menjadi 1,35 atau 35%. Berarti skor yang dipilih adalah skor 1 pada tahun 2017 yaitu skor tertinggi.

g. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset

$$TMS \text{ Terhadap } TA = \frac{\text{total modal sendiri}}{\text{total asset}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} TMS \text{ Terhadap } TA (2015) &= \frac{8.912.939.459.826}{11.080.636.007.966} \times 100 \% \\ &= 0,80 \text{ atau } 80 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} TMS \text{ Terhadap } TA (2016) &= \frac{10.424.740.277.906}{13.369.970.895.524} \times 100 \% \\ &= 0,77 \text{ atau } 77 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} TMS \text{ Terhadap } TA (2017) &= \frac{11.921.127.291.696}{14.455.702.232.828} \times 100 \% \\ &= 0,82 \text{ atau } 82 \% \end{aligned}$$

Artinya setiap aktiva dibelanjai dari modal sendiri sebesar 0,80 atau 80% (berarti memperoleh skor 4,25) pada tahun 2015,dan di tahun 2016 mengalami penurunan 0,77 atau 77% (skor 4,25) kemudian ditahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 0,82 atau 82% hal ini terjadi karena total modal sendiri dan total assetnya meningkat yaitu 0.82 atau 82% (skor 4).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian untuk penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisi rasio berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang merupakan sampel dalam penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian dilihat dari sisi rasio pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selama periode 2015 sampai dengan tahun 2017 dari sisi Kepmen BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002 memiliki tingkat kesehatan yang sehat dikarenakan mampu memenuhi kewajibannya.
2. Dari hasil penelitian dilihat dari sisi rasio pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selama periode 2015-2017 dari sisi Kepmen BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002 dihitung dengan *Return on Equity (ROE)* dan *Return on Investment (ROI)* memiliki tingkat kesehatan yang sehat, Untuk *Rasio kas/Cash Rasio* dapat dikatakan baik bagi perusahaan.
3. Dari hasil penelitian dilihat dari sisi rasio pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selama tiga tahun terakhir dapat disimpulkan dari Kepmen BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002 dihitung dengan *Current Ratio*, *Collection Periods (CP)* dan Perputaran Total

Asset/Total Asset Turn Over (TATO), Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset memiliki tingkat kesehatan yang sehat pada laba bersih, ekuitas, dan asset terus meningkat.

4. Secara umum dilihat dari Kepmen BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002, perusahaan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien yang menunjukkan meningkatnya kinerja-kinerja perusahaan dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Dan lebih meningkatkan ketelitian juga diharapkan untuk mengoptimalkan laba agar dapat lebih baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan kesimpulan yang telah diambil, maka penulis mengajukan saran, agar perusahaan lebih meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan keuntungan dengan cara lebih menekankan biaya-biaya perusahaan. Peningkatan laba dengan cara meningkatkan pendapatan dan menekankan biaya perusahaan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeng, T, 2005, **Revormasi BUMN, BUMN Indonesia Isu Kebijakan dan Startegi, 3**
- Asih Eka Putri, 2014, **Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**, Friedrich-Ebert-Stiftung: Jakarta.
- Bambang, Riyanto, 2001. **Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan**, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Dwidjo Wijoto, R.N. dan Siahaan, R.S.P, 2005, **Prolog BUMN Indonesia, Isu Kebijakan dan Strategi, XV**
- Fahmi, Irham. 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Husnan Suad dan Enny Pudjiastuti, 2004, **Dasar-Dasar Manajemen Keuangan**, edisi pertama, cetakan pertama, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Kementrian BUMN,4 Juni 2002, Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia kepala Biro Hukum BUMN Nomor:KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 juni 2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Jakarta.
- Martono, & Harjito, A. (2005). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UI.
- Munawir, S. 2012. *Analisis Informasi Keuangan*, Liberty, Yogyakarta
- Martono dan Agus Harjito, 2008, **Manajemen Keuangan**, edisi pertama, cetakan ketujuh, Penerbit : Ekonesia, Yogyakarta
- Riphat, S. 4 September 2002, **Lemah Kontrol Daerah Terhadap BUMN (Online)**. (<http://www.bumn-ri.com/news.detail.html?news-id=2007> di akses 8 juni 2006)
- Soedjais, Z. 2005, **BUMN Pasca UU BUMN. BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan dan Strategi, 65**.
- Sukardi, L 2005. **Membangun Tata Kelola BUMN**. BUMN Indonesia, Isu, kebijakan, dan Strategi 15
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, **Tentang Badan Usaha Milik Negara**, 2003, Jakarta, Sinar Grafik.

Wibowo, D.H. 20 Desember 2004. Menkeu Sugiharto, **Tolak Syarat ADB (Online)**. (Http.www.bumn-ri.com/news.detail.html? news-id=6626, diakses 8 juni 2006)

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/20299/19142>

<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/850/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/tiny_mce/PERATURAN/09012015_110215_PP_Nomor_99_Th.2013.pdf

<https://djsn.go.id/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>

<https://jalantikus.com/tips/jenis-bpjs-ketenagakerjaan/>

<https://donaldtintin.blogspot.com/2015/05/makalah-tentang-bpjs.html>

<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-tugas-dan-tanggung-jawab-manajer-keuangan/>

<https://www.google.com/search?q=investasi&oq=investasi+&aqs=chrome..69i57j0l5.3699j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

https://www.google.com/search?safe=strict&ei=VzBBXY21NN-8vASghJ-IDA&q=tugas+direktur+pengembangan+investasi&oq=tugas+direktur+pengembangan+investasi&gs_l=psy

L

A

M

UNIVERSITAS

BOSOWA

P

I

R

A

N



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2015 dan 2014 serta 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)**

ASET

	Catatan	2015	2014	1 Januari 2014
		Rp	Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp	Rp
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	7, 51	1.244.955.540.872	1.444.063.104.182	286.484.028.027
Piutang Dana Operasional				
Program Jaminan Kecelakaan Kerja	8	33.124.581.141	40.349.497.947	-
Program Jaminan Hari Tua	8	25.854.155.524	34.758.530.576	-
Program Jaminan Kematian	8	15.670.225.618	15.346.090.545	-
Piutang Investasi	9	1.799.478.123	26.156.646.297	12.858.362.558
Piutang Hasil Investasi	10	33.687.019.965	33.050.598.995	23.192.860.056
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	11	738.025.431.567	677.349.361.651	-
Piutang Lain	12	31.914.946.830	266.707.110.100	636.642.731.956
Deposito	13, 52	2.965.564.054.450	2.661.231.586.832	2.069.293.691.000
Uang Muka	14	18.745.680.423	10.146.529.021	24.907.161.877
Pajak Dibayar di muka	30	2.098.252.102	-	1.386.864.948
Beban Dibayar di muka	15	41.234.437.943	31.620.937.786	31.911.432.929
Investasi Jangka Pendek				
Saham	16, 52	1.812.003.383.340	2.622.831.953.460	3.097.235.191.439
Reksadana	17, 52	327.786.096.532	404.680.400.892	448.051.614.012
Pinjaman yang Diberikan Program Manfaat				
Layanan Tambahan - Setelah dikurangi				
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		-	-	492.098.733.108
Piutang Usaha - Setelah dikurangi				
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	18	10.733.228.038	3.541.619.964	2.001.336.078
Perengkapan	19	7.508.237.202	5.739.138.579	6.458.587.255
Aset Dimiliki Untuk Dijual		4.306.935	165.377.210	2.377.184
Aset Lancar Lain yang akan diserahkan kepada				
Dana Jaminan Sosial Kesehatan		-	-	410.854.945.704
TOTAL ASET LANCAR		7.310.709.056.605	8.277.738.484.037	7.543.379.918.131
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi Jangka Panjang				
Efek Beragun Aset	20, 52	50.861.628.512	72.292.680.794	95.555.642.529
Sukuk	21, 52	65.798.000.000	65.798.000.000	73.109.000.000
Obligasi	22, 52	1.737.878.191.092	1.721.984.052.399	1.432.447.895.461
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi				
Penyisihan Penurunan Nilai	23	26.594.600.648	26.590.282.648	30.813.767.448
Properti Investasi - Setelah dikurangi				
Akumulasi Penyusutan	24	81.006.558.022	80.518.077.994	76.373.771.864
Aset Tetap - Setelah dikurangi				
Akumulasi Penyusutan	25	1.267.579.857.071	890.801.717.068	582.425.121.653
Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) Program				
Manfaat Layanan Tambahan -				
Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan		-	-	161.230.918.989
Aset Takberwujud - Setelah Dikurangi				
Akumulasi Amortisasi	26	60.651.858.326	52.826.709.026	11.950.135.062
Aset Pajak Tangguhan	30	472.016.951.198	382.748.681.314	271.830.073.331
Aset Tidak Lancar Lain	27	7.539.306.492	9.721.171.940	17.745.677.946
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		3.769.926.951.361	3.303.281.373.183	2.753.482.004.283
TOTAL ASET		11.080.636.007.966	11.581.019.857.220	10.296.861.922.414

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2015 dan 2014 serta 1 Januari 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)**

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2015	2014 Disajikan Kembali- Catatan 6	1 Januari 2014
		Rp	Rp	Rp
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Bank Entitas Anak	28	2.500.000.000	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	29, 51	25.481.564.909	56.082.026.554	285.694.577
Utang Pajak	30	64.828.791.007	336.861.397.051	358.315.759.050
Beban AkruaI	31	536.866.842.513	314.049.788.955	186.377.770.702
Pendapatan Diterima di muka	32, 52	3.918.330.008	4.647.275.829	3.302.016.750
Liabilitas Jangka Pendek Lain	33, 52	280.110.361.702	345.210.585.159	78.426.718.800
Liabilitas Jangka Pendek Lain yang Akan Diserahkan Kepada DJS Kesehatan		-	-	410.854.945.704
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		913.705.890.139	1.056.851.073.548	1.037.562.905.583
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Manfaat Layanan Tambahan untuk Operasional		-	-	792.482.725.241
Manfaat Layanan Tambahan Telah Disalurkan		-	-	666.480.464.503
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	34	1.253.990.658.001	1.254.155.757.280	483.125.094.687
Liabilitas Jangka Panjang Lain		-	-	4.148.652.622
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		1.253.990.658.001	1.254.155.757.280	1.946.236.937.053
TOTAL LIABILITAS		2.167.696.548.140	2.311.006.830.828	2.983.799.842.636
EKUITAS				
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal	35	8.471.953.114.152	7.823.338.452.469	7.823.338.452.469
Tambahan Modal Disetor	6, b, 36	1.408.126.715.496	-	-
Ekuitas yang Berasal dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali		-	1.413.106.612.854	-
Saldo Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	37	(1.087.599.512.838)	(160.767.931.792)	(510.279.209.099)
Saldo Penghasilan Neto		120.456.201.050	194.332.827.404	-
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		8.912.936.517.860	9.270.009.960.935	7.313.059.243.370
Kepentingan Non Pengendali	38	2.941.966	3.065.457	2.836.408
TOTAL EKUITAS		8.912.939.459.826	9.270.013.026.392	7.313.062.079.778
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		11.080.636.007.966	11.581.019.857.220	10.296.861.922.414

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2015	2014
		Rp	Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
PENGHASILAN OPERASIONAL			
Pengelolaan Dana Jaminan Sosial - Program Jaminan Hari Tua	39	2.633.908.921.477	1.996.694.755.416
Pengelolaan Dana Jaminan Sosial - Program Jaminan Kecelakaan Kerja	39	349.349.275.021	302.587.677.428
Pengelolaan Dana Jaminan Sosial - Program Jaminan Kematian	39	157.145.322.474	137.211.588.774
Total Penghasilan Operasional		3.140.403.518.972	2.436.594.021.618
BEBAN OPERASIONAL			
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	40	2.158.229.854.761	1.886.127.516.987
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	40	386.108.104.075	397.079.477.260
Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian	40	240.941.094.587	198.539.738.630
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	40	226.484.628.912	--
Total Beban Operasional		3.011.763.682.335	2.481.746.732.877
PENGHASILAN (BEBAN) OPERASIONAL		128.639.836.637	(45.152.711.259)
PENGHASILAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Investasi	41	736.192.170.585	850.764.068.502
Pendapatan Entitas Anak	42	50.654.820.196	44.815.158.107
Pendapatan Lain	43	137.751.414.837	399.689.226.248
Beban Investasi	44	(146.878.673.990)	(91.176.305.025)
Beban Usaha Entitas Anak	45	(68.098.750.473)	(63.116.067.269)
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	47	(12.185.738.772)	(13.617.907.770)
Beban Lain-lain	48	(21.925.700.850)	(15.854.241.198)
Pendapatan (Beban) Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP	46	25.048.781.488	-
TOTAL PENGHASILAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		700.558.323.021	1.111.503.931.595
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK		829.198.159.658	1.066.351.220.336
Beban Pajak Penghasilan	30	(204.582.745.164)	(353.419.771.332)
PENGHASILAN (BEBAN) NETO TAHUN BERJALAN		624.615.414.495	712.931.449.004
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual		(926.831.581.046)	349.511.277.307
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti		(8.299.348.805)	(54.829.893.570)
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		2.110.208.049	13.707.473.393
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		(933.020.721.802)	308.388.857.129
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(308.405.307.307)	1.021.320.306.134

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	2015	2014
	Rp	Disajikan Kembali- Catatan 6 Rp
PENHASILAN (BEBAN) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik Entitas Induk	624.615.566.279	712.931.219.955
Kepentingan Non Pengendali	(151.784)	229.049
	624.615.414.495	712.931.449.004
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik Entitas Induk	(308.405.183.816)	1.021.320.077.085
Kepentingan Non Pengendali	(123.491)	229.049
	(308.405.307.307)	1.021.320.306.134

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2015 Rp	2014 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan			
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja		349.349.275.021	262.338.179.539
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua		2.633.908.921.477	1.961.936.224.841
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian		157.145.322.474	121.865.498.230
Operasional Lain		319.370.977.282	336.721.829.716
		<u>3.459.774.496.254</u>	<u>2.682.861.732.326</u>
Pengeluaran			
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja		(350.778.999.950)	(402.271.406.114)
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua		(1.992.231.403.007)	(1.910.789.179.044)
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian		(223.727.515.264)	(201.135.703.057)
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun		(209.999.177.379)	-
		<u>(2.776.737.095.600)</u>	<u>(2.514.196.288.215)</u>
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		<u>683.037.400.654</u>	<u>168.665.444.111</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan			
Pelepasan Investasi		31.448.061.142.781	1.397.988.560.006
Pelepasan Aset Tetap		896.317.037	19.036.182.951
		<u>31.448.957.459.818</u>	<u>1.417.024.742.957</u>
Pengeluaran			
Perolehan Investasi		(31.786.849.153.380)	(629.625.333.858)
Perolehan Aset Tetap		(497.872.666.174)	(298.485.777.055)
		<u>(32.284.721.819.554)</u>	<u>(928.111.110.913)</u>
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		<u>(835.764.359.736)</u>	<u>488.913.632.044</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan			
Setoran Modal Pemerintah		-	500.000.000.000
		-	<u>500.000.000.000</u>
Pengeluaran			
Kontribusi kepada Program Jaminan Kecelakaan Kerja		(4.140.093.585)	-
Kontribusi kepada Program Jaminan Hari Tua		(28.290.639.499)	-
Kontribusi kepada Program Jaminan Kematian		(2.070.046.793)	-
Lain-lain		(11.879.824.351)	-
		<u>(46.380.604.229)</u>	<u>-</u>
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		<u>(46.380.604.229)</u>	<u>500.000.000.000</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		(199.107.563.310)	1.157.579.076.155
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	7	<u>1.444.063.104.182</u>	<u>286.484.028.027</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	7	<u>1.244.955.540.872</u>	<u>1.444.063.104.182</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3b,5,55,56	1.066.045.410.503	1.042.826.293.596
Piutang Dana Operasional			
Program Jaminan Hari Tua	3c,6	721.054.210	45.600.822.496
Program Jaminan Kecelakaan Kerja	3c,6	5.096.181.231	21.110.281.911
Program Jaminan Kematian	3c,6	4.840.572.299	5.525.825.814
Program Jaminan Pensiun	3c,6	577.298.792	5.761.104.990
Piutang Investasi	3c,7	633.112.983	-
Piutang Hasil investasi	3c,8,55,56	78.108.107.544	70.839.317.406
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	3e,9,55,56	543.946.577.028	667.290.848.875
Piutang Lain	10,55,56	20.959.701.826	36.587.734.117
Deposito	11,55,56	2.429.225.500.000	3.008.678.238.101
Uang Muka	3d,12	6.942.682.064	8.135.486.460
Pajak Dibayar di muka	3f13	1.360.548.446	1.307.583.551
Beban dibayar di muka	14	48.897.061.706	33.249.911.986
investasi Jangka Pendek			
Saham	15,55,56	1.321.246.065.194	1.692.456.410.583
Reksadana	16,55,56	1.549.170.148.178	521.204.429.864
Piutang Usaha - Setelah dikurangi			
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3f,17,55,56	10.915.416.741	4.199.836.484
Perengkapan	3g,18	10.529.367.744	9.040.484.323
Aset Dimiliki Untuk Dijual	19	156.251.874	6.249.546
Aset Lancar Lainnya	20	643.369.937	-
Jumlah Aset Lancar		7.097.014.436.297	7.161.820.859.893
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi Jangka Panjang			
Efek Beragun Aset	21,55,56	14.898.756.363	31.363.815.274
Sukuk	3n,22,55,56	1.458.766.151.124	1.469.938.572.816
Obligasi	23,55,56	3.902.301.560.065	2.730.886.144.906
Penyertaan Langsung - Setelah dikurangi			
Penyisihan Penurunan Nilai	24,55,56	26.594.600.648	26.594.600.648
Properti Investasi - Setelah dikurangi			
Akumulasi Penyusutan	3h,25	84.604.306.781	85.722.178.829
Aset Tetap - Setelah dikurangi			
Akumulasi Penyusutan	3j,31,26	1.260.819.848.846	1.251.461.502.069
Aset Tak berwujud - Setelah dikurangi			
Akumulasi Amortisasi	3i,27	79.426.541.332	48.867.992.704
Aset Pajak Tangguhan	3i,28	520.826.202.270	551.829.834.769
Aset Tidak Lancar Lain	3m,29	10.649.829.101	11.485.395.826
Jumlah Aset Tidak Lancar		7.358.687.796.531	6.208.150.035.641
JUMLAH ASET		14.455.702.232.828	13.369.970.895.524